# BAB V
# SIMPULAN DAN SARAN

Dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut :

## 5.1 Simpulan

1. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan UPPD Provinsi Wilayah XXIII Padalarang secara keseluruhan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2005 sudah maksimal atau sudah memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp 3.013.048.684; Rp 5.953.178.360; Rp 9.449.624.642; Rp 12.869.545.889; Rp 16.308.102.826; Rp 19.751.232.025; Rp 23.441.897.644; Rp 27.174.150.080; Rp 30.705.532.905; Rp 34.691.954.880; Rp 37.363.699.270; dan Rp 40.559.022.010.
2. Pada UPPD Provinsi Wilayah XXIII Padalarang, pajak yang diberi wewenang oleh Pemerintah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana pajak ini merupakan pendapatan yang terbesar. PKB sangat penting bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna menopang Pembangunan Daerah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat banyak.
3. PKB pada UPPD Provinsi Wilayah XXIII Padalarang dikenal dengan sebutan SAMSAT. Dengan adanya samsat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima, agar masyarakat dapat dengan mudah membayar PKB baik secara langsung maupun tidak langsung. Masayarakat memberikan peranan penting bagi pemerintah dalam proses menunjang pendapatan daerah. Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di daerah, khususnya Dinas Pendapatan UPPD Provinsi Wilayah XXIII Padalarang berkewajiban serta diberikan wewenang untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai daerah penghasil untuk

menghimpun , mendata, dan mendistribusikan pajak yang berasal dari masyarakat, sehingga dapat memberikan peran dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

## 5.2 Saran

1. Dalam proses pungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPPD Provinsi Wilayah XXIII Padalarang yang gunanya untuk meningkatkan peran terhadap pendapatan daerah, kadang menghadapi dilema yang sampai saat ini terus diupayakan peningkatannya. Kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh UPPD Provinsi Wilayah XXIII Padalarang antara lain :
    1) Masih lemahnya sistem pelayanan Samsat, yang berimplikasi secara langsung terhadap masyarakat, sehingga dalam proses pembayaran PKB terkadang mengalami hambatan;
    2) Sistem pelayanan yang dilakukan UPPDP Wilayah XXIII Padalarang dirasakan kurang signifikan, dikarenakan pelayanannya tersebut dilakukan apabila Wajib Pajak datang langsung ke Kantor Samsat;
    3) Belum adanya perangkat hukum yang baik yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak datang ke Kantor Samsat, Wajib Pajak tersebut hanya mendapat sanksi yang berupa pengenaan denda;
    4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga mengakibatkan penumpukkan tunggakkan yang seharusnya pendapatan maksimal, menjadi tidak maksimal.

    Untuk menutupi kelemahan-kelemahan tersebut, UPPD Provinsi wilayah XXIII Padalarang, melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi hal tersebut antara lain :
    1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait seperti kepolisian dan jasa raharja, guna meningkatkan pendapatan daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan;

2) Melakukan pungutan sistem persuasif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, agar masyarakat merasa terdorong dan sadar akan pajak. Sehingga volume yang membayar pajak secara otomatis akan meningkat.

2. Diharapkan dapat merubah sistem pelayanan kepada masyarakat. Apabila sistem tersebut dipermudah, maka pendapatan dari sektor PKB dapat meningkat yang secara langsung berperan terhadap pendapatan daerah. Selain itu, agar masyarakat sadar akan pembayaran pajak yang merupakan suatu kewajiban yang sudah melekat.
3. Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini, diharapkan Dispenda khususnya UPPD Provinsi Wilayah XXIII Padalarang dapat memberikan kontribusi yang lebih baik guna meningkatkan pendapatan daerah. Dan dari segi personil yang ada di Samsat, diharapkan diadakan sejenis pelatihan-pelatihan/pendidikan yang menambah wawasan ilmu tentang sistem pelayanan kepada masyarakat, sehingga timbul hubungan timbal balik yang kondusif antara pemerintah dan masyarakat.